

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten. Mulai pertengahan tahun 2019 tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2019, kantor DPRD Banggai Laut resmi menempati bangunan baru yang lokasinya di Jalan Tinakin Darat, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Sekretaris DPRD Provinsi Kabupaten Banggai Laut yang dibentuk berdasarkan (Peraturan Daerah Banggai Laut Nomor 1, 2017) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Provinsi yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Banggai Laut, yang kemudian di tindaklanjuti dengan (Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 32, 2019) mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banggai Laut, Sekretariat DPRD Provinsi Banggai Laut mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : “Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.”

Fasilitas kantor sangat mempengaruhi aktivitas para pekerja didalamnya sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan dengan ruang kerja yang kurang representatif pada kantor DPRD ini, maka sangat mempengaruhi aktivitas bekerja para anggota dewan dan juga staff kantor. Tren desain kantor terus-menerus berganti mengikuti perkembangan zaman, ruang kantor yang nyaman akan membuat produktifitas para pekerja terus meningkat.

Menurut (Sinambela, 2006) dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pengelola Pemerintah, serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, suatu kegiatan dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu menurut (Sedarmayanthi, 2009) mengemukakan bahwa lingkungan kerja adalah tempat karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang nyaman memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional karyawan. Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat

perkakas dan bahan yang ditemuinya, lingkungan tempat ia bekerja, cara ia bekerja baik secara individu maupun kelompok.

Permasalahan umum pada kantor DPRD ini yaitu fasilitas kantor yang belum sesuai dengan aktivitas, akses pelayanan publik yang belum memenuhi kebutuhan untuk masyarakat yang datang, furnitur pada area lobby kantor belum ditata dengan baik agar pengunjung/masyarakat yang datang bisa menunggu dilobby dengan nyaman, area resepsionis pada lobby terletak disebelah kiri pintu masuk dan tidak terlihat oleh pengunjung pada saat masuk ke lobby kantor. Ruang rapat paripurna yang dijadikan beberapa fungsi yaitu menjadi ruang rapat paripurna, ruang rapat panitia khusus, dan juga rapat dengan agenda lainnya dikarenakan belum adanya fasilitas didalam ruang rapat panitia khusus, komisi, dan ruang rapat DPRD. Sehingga untuk sementara waktu harus menggunakan ruang rapat paripurna untuk melaksanakan rapat pansus dan juga rapat dengan agenda lainnya. Terdapat ruangan-ruangan yang belum difungsikan dengan baik. Sirkulasi disetiap ruangan pada kantor ini sepenuhnya belum mendukung produktivitas aktivitas pengguna didalamnya. Serta elemen pembentuk dan pengisi ruang masih terlihat kaku dan tertutup sehingga kurang sesuai dengan fungsi dari DPRD sendiri yang transparan yaitu menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, sekretariat DPRD Banggai Laut merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan misi ke-5 pemerintah daerah kabupaten Banggai Laut, yaitu “Menciptakan kelembagaan pemerintah daerah yang handal, profesional, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik”. Untuk menunjang agar kantor ini dapat berfungsi dengan baik, maka interior didalam kantor ini harus dilakukan perancangan ulang agar dapat mendukung kebutuhan aktivitas yang nyaman dan aman untuk para pengguna ruang. Perancangan ulang interior kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut menerapkan pendekatan aktivitas pengguna ruang yaitu aktivitas dari kantor DPRD itu sendiri, agar dapat memberikan fasilitas pelayanan publik yang baik untuk masyarakat yang datang, dan memberikan fungsi untuk masing-masing ruang agar dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsi ruang sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dan juga sesuai dengan fungsi DPRD sendiri yang dituntut harus lebih terbuka/transparan kepada masyarakat sehingga ruangan harus terlihat lebih welcome kepada pengunjung yang datang. Menerapkan standarisasi dari kantor pemerintahan dan juga standarisasi dari buku human dimension, sesuai dengan aktivitas yang ada pada kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah melakukan observasi langsung dan juga data yang didapatkan dari hasil wawancara dan penjelasan pada latar belakang adapun identifikasi masalah pada perancangan kantor DPRD Banggai Laut yaitu :

1.2.1 Identifikasi Masalah

A. Organisasi Ruang

- Fasilitas pelayanan publik belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan aktivitas masyarakat yang berkunjung pada kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut,
- Area resepsionis tidak terlihat oleh pengunjung pada saat pertama kali masuk ke lobby kantor,
- Elemen pembentuk dan pengisi ruang masih terlihat kaku dan tertutup sehingga kurang sesuai dengan fungsi dari DPRD sendiri yang transparan yaitu menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat.
- Fasilitas ruang rapat belum sesuai dengan fungsi ruang, sehingga belum mendukung efektivitas anggota rapat.
- Ruang kerja yang kurang representatif, serta penataan layout furnitur masih kurang tertata dengan baik mengakibatkan aktivitas bekerja terganggu.

B. Persyaratan Umum Ruang

- Pada ruang rapat belum menggunakan akustik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dari perancangan ulang kantor ini adalah :

- a. Bagaimana merancang interior ruang kantor DPRD Kabupaten Banggai laut agar dapat memenuhi akses kebutuhan pelayanan publik untuk masyarakat ?
- b. Bagaimana merancang interior ruang agar sesuai dengan fungsi masing-masing ruang dan mendukung aktivitas pengguna didalamnya sesuai dengan fungsi dari DPRD sendiri yang transparan dan juga membuat ruangan terlihat lebih *welcome* untuk masyarakat/pengunjung yang datang ?
- c. Bagaimana merancang ruang rapat sehingga dapat mendukung efektivitas anggota DPRD selama rapat berlangsung ?

1.4 Tujuan Dan Sasaran Perancangan

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari desain ulang interior kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut yaitu merancang kantor sesuai dengan standarisasi kantor pemerintahan serta sesuai dengan standar ergonomi yang berlaku. Dan merancang interior ruang sesuai dengan fungsi ruang dan aktivitas pengguna dan pengunjung. Rancangan ruang kantor dengan pendekatan yang transparan dan efisien. Fokus pada aktivitas utama anggota DPRD yaitu sering mengadakan rapat pertemuan membahas mengenai peraturan daerah dan pembahasan pemerintahan lainnya dan pelayanan publik.

1.4.2 Sasaran Perancangan

Adapun sasaran dari perancangan ulang kantor adalah :

- a. Untuk para anggota dewan dan juga staff agar memiliki fasilitas sesuai dengan kebutuhan aktivitas,
- b. Agar memberikan kenyamanan pelayanan publik untuk setiap masyarakat yang datang,
- c. Memberikan suasana ruang kerja dan ruang rapat yang tidak kaku.

1.5 Batasan Perancangan

Batasan perancangan ulang kantor adalah :

- a. Nama Proyek : Perancangan ulang kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut,
- b. Fungsi Bangunan : Kantor pelayanan publik,
- c. Lokasi : Jl. Tinakin Darat, Desa Lampa, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 98791,
- d. Luasan total bangunan : 2.628 M2.
- e. Jumlah lantai : 2
- f. Fasilitas utama yang akan dirancang :
 - Lobby (area resepsionis, area loket, area tunggu)
 - Ruang Pelayanan Masyarakat
 - Ruang rapat paripurna
 - Ruang rapat panitia khusus
 - Ruang ketua DPRD
 - Ruang wakil ketua I & II DPRD
 - Ruang Konferensi Pers
 - Ruang Komisi

- Ruang kepala bagian
 - Ruang kerja staff
- g. Batasan lahan :
- Utara : Hutan, Kantor urusan agama (KUA)
 - Selatan : Jalan & Hutan
 - Timur : Jalan arah ke kota Banggai
 - Barat : Hutan

1.6 Manfaat Perancangan

a. Manfaat Bagi Masyarakat

Kemudahan kenyamanan masyarakat ketika datang ke kantor serta memudahkan pelayanan publik untuk masyarakat.

b. Bagi Institusi

Perancangan ulang pada kantor ini dapat memenuhi kebutuhan aktivitas pengguna didalamnya sehingga para anggota dewan dan staff dapat bekerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Selain itu memberikan pemahaman bahwa desain ruang kantor yang baik dapat mendukung semangat dalam bekerja.

c. Bagi Keilmuan Interior

Memberikan informasi dan menunjukkan desain kantor yang baik, khususnya untuk desain kantor pemerintahan.

1.7 Metode Perancangan

Menggunakan 2 jenis metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, maka harus melalui beberapa tahapan seperti melakukan observasi langsung, wawancara kepada narasumber, serta proses dokumentasi. Selanjutnya, untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi banding dari objek sejenis dan juga studi literatur jurnal-jurnal objek terkait yang dijadikan sebagai referensi.

Setelah itu data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2006 : 14) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Pratiwi, 2017)

Metode perancangan adalah sebagai berikut :

a. Penentuan Objek

Penentuan objek yang dilakukan yaitu dengan cara survey langsung, melihat fenomena-fenomena apa saja yang terjadi, dan mencari informasi umum mengenai objek penelitian yang akan diamati.

b. Pengumpulan Data

Berikut merupakan proses pengumpulan data, yaitu :

1. Data Primer

- Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut. Proses observasi dilakukan dengan datang langsung ke lokasi bangunan pada tanggal 27 September 2021. Berlokasi di Jl. Tinakin Darat, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut 94891 yaitu menganalisis fungsi dari masing-masing ruangan sehingga dapat memperoleh informasi serta kesimpulan untuk memudahkan dalam proses mendesain kantor yang berkaitan dengan identifikasi masalah. Data yang diperoleh antara lain : Mengetahui aktivitas pengguna kantor DPRD Banggai Laut mulai dari anggota dewan hingga staff kantor, fasilitas kantor belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan aktivitas para pengguna ruang, mengetahui eksisting bangunan dan kondisi lingkungan kantor DPRD Banggai Laut, mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas para pengguna ruang.

- Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu, ibu kepala bagian umum & keuangan, ibu kepala bagian persidangan & perundang-undangan, staff bagian umum & keuangan, anggota komisi I, dan petugas keamanan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yaitu, struktur organisasi, jumlah tenaga kerja ASN dan Non ASN, fasilitas sarana dan prasarana kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut, aktivitas yang dilakukan dari pengguna masing-masing ruang, jam operasional kantor, jumlah fraksi, dan kebutuhan fasilitas apa saja yang masih kurang atau belum memenuhi kebutuhan aktivitas didalamnya.

- Dokumentasi
Proses dokumentasi dilakukan pada ruangan-ruangan kantor yang meliputi : Lobby, ruang rapat paripurna, ruang rapat khusus, ruang ketua Dewan, ruang kepala bagian, ruang komisi, ruang fraksi, ruang staff, koridor kantor, mushola, tempat wudhu, dan toilet.

2. Data Sekunder

- Studi preseden dan studi banding
Pada tahap pengumpulan data ini, melakukan proses pencarian data melalui internet. Dengan tujuan sebagai pembandingan pada fasilitas kantor yang ada. Untuk dijadikan referensi dalam proses desain.
- Buku & Jurnal Penelitian
Mencari dan membaca beberapa buku atau jurnal penelitian, agar mendapatkan standarisasi untuk digunakan dalam perancangan. Buku dan jurnal yang digunakan antara lain : buku dimensi manusia dan ruang interior, Studi literatur pada keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2016 tentang Standarisasi Ruang Kantor Dan Sarana Prasarana Kantor, D.K Ching Buku Arsitektur dan Tata Ruang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011.

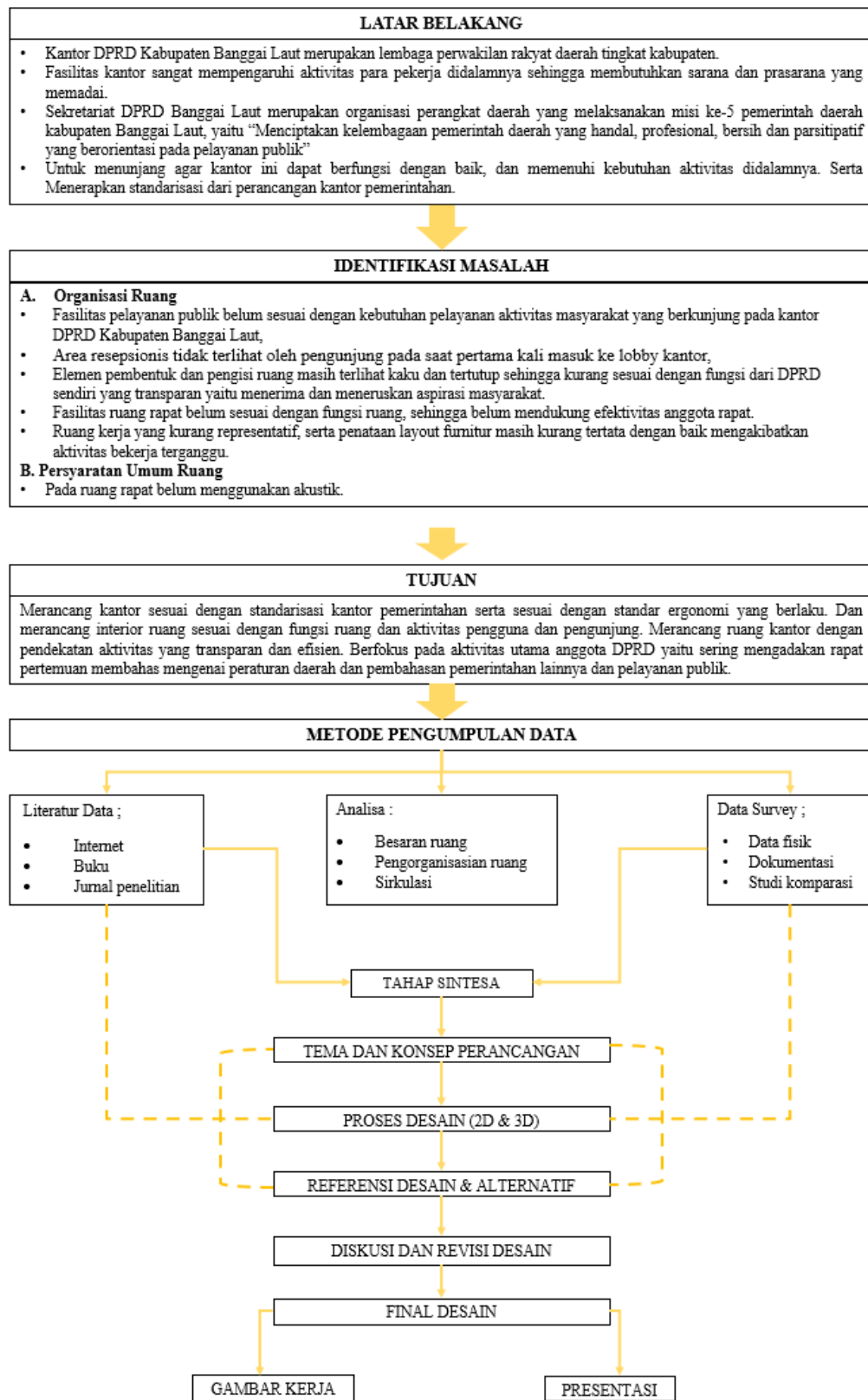
c. Tahapan Perancangan

Pada perancangan ulang interior kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut, melalui beberapa proses tahapan perancangan yaitu sebagai berikut :

- Studi Komparatif
Melakukan studi komparatif, dengan cara mengumpulkan data-data terkait dengan projek perancangan. Lalu melakukan analisa dan perbandingan.
- Analisis Data
Data dikumpulkan melalui proses survey lapangan, juga hasil dari studi preseden dan studi banding yang di analisa meliputi masalah umum yang terjadi, dan dijadikan sebagai referensi perancangan ulang kantor sebagai solusi desain meliputi standarisasi ruang kantor dan sarana prasarana kantor pemerintahan, standarisasi melalui buku dimensi manusia dan ruang interior, kebutuhan aktivitas pengguna, alur sirkulasi, zoning-blocking, analisa aktivitas, hubungan antar ruang, dan tabel perbandingan hasil studi banding.

- Sintesa
Setelah melakukan analisa data, tahap selanjutnya yaitu merangkum dan membuat kesimpulan terkait studi literatur yang akan menjadi solusi pada permasalahan projek desain. Solusi dari permasalahan desain tersebut, dijadikan gagasan dalam proses desain.
- Konsep Desain
Tahap selanjutnya adalah membuat konsep desain, gagasan yang menghasilkan ide-ide untuk konsep desain yang akan diterapkan ke dalam interior kantor.
- Output
Hasil akhir dari metode perancangan, akan menghasilkan desain yaitu : gambar kerja teknik, portofolio desain, skema material, dan presentasi desain.

1.8 Kerangka Berfikir



Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir
Sumber : Dokumen Pribadi

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari 3 bab yang ditulis dengan menggunakan sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan latar belakang perancangan interior kantor DPRD Banggai Laut, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan batasan perancangan, manfaat perancangan, metode perancangan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Berisi uraian-uraian mengenai kajian literatur mulai dari kantor secara umum hingga kantor yang diangkat yaitu kantor DPRD Banggai Laut dan pendekatan penelitian literatur, Analisa studi kasus bangunan serupa, dan Analisa data proyek.

BAB III : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

Mencakup studi analisis kantor sejenis, deskripsi proyek dari kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut dan juga data-data proyek beserta analisisnya.

BAB IV : TEMA, KONSEP PERANCANGAN DAN APLIKASI PERANCANGAN

Penjelasan tema dan konsep yang diterapkan ke dalam desain. dan pemilihan denah khusus, penjelasan implementasi konsep tata ruang denah khusus, persyaratan teknis ruangan dan elemen interior.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penulisan laporan yang berisi kesimpulan dan saran penulis dari sebuah penelitian berdasarkan Perancangan Ulang Interior Kantor DPRD Kabupaten Banggai Laut yang di desain.

DAFTAR PUSTAKA